
Model Pengorganisasian Perempuan Desa Inklusi Bebas Miskin (DBM): Reinkarnasi Kearifan Lokal *Sabanda Sariksa* Di Desa Sukasenang, Kabupaten Garut.

Bambang Rustanto ^{1*}, Tuti Kartika ², Ayi Haryani ³

¹ Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung-Indonesia

Keywords:

Inclusive Village, Social Capital, Sabanda Sariksa, Poverty Alleviation, Sukasenang Village

Abstract: Poverty in the rural areas of West Java demands an approach that is not only top-down but also rooted in well-established local values. This community service article aims to formulate and document the implementation of the poverty-free inclusive village model (Desa Inklusi Bebas Miskin/DBM) in Sukasenang village, Garut Regency. The DBM model is designed as a form of reincarnation and social restoration of Sundanese local wisdom, such as the *Rumah Leuit* (rice barn) concept and the *Sabanda Sariksa* philosophy, integrated with Robert Putnam's social capital theory. The primary focus of this program is to create an inclusive social protection system for ultra-poor households (RTSM) and socio-economically vulnerable women (PRSE). The method employed in this service is community development, involving stages of socialization, the formation of the village social committee (KSD), participatory assessment, and the formulation of a village action plan. The results indicate that integrating local wisdom into modern structures effectively activates three dimensions of social capital: *bonding* (strengthening internal solidarity among the poor), *bridging* (linking vulnerable groups with market access and entrepreneurs), and *synergy* (collaboration between formal government institutions and grassroots organizations such as PKK, Amirah women's cooperative, and joint business groups/KUBE). Program implementation includes economic empowerment through vocational training for women, restoration of educational functions for out-of-school children, and the initiation of *Collective Farming* as a modern form of village granary. The conclusion of this activity confirms that the DBM model is effective in reducing community dependence on temporary stimulant aid and shifting the aid paradigm toward sustainable empowerment. Through the transformation of grassroots institutions, Sukasenang Village has successfully created an independent inclusive ecosystem where social vulnerability is addressed through organized, rational, and professional mutual cooperation (*gotong royong*) without abandoning its local cultural identity.

Introduction

Kemiskinan di wilayah perdesaan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup eksklusi sosial dan hilangnya akses terhadap

sumber daya dasar. Di Jawa Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Garut, tantangan kemiskinan seringkali berhadapan dengan pergeseran struktur sosial akibat modernisasi yang perlahan mengikis nilai-nilai komunal. Desa Sukasenang, yang terletak di Kecamatan Bayongbong, menjadi potret nyata dari kontradiksi antara potensi alam yang subur dengan angka kerentanan ekonomi yang masih signifikan. Sebagai desa hasil pemekaran tahun 1980, Sukasenang memiliki karakteristik topografi dataran di lembah Gunung Cikuray dengan ketinggian 450–550 mdpl. Meskipun dikelilingi oleh hamparan persawahan produktif dan dialiri oleh sungai besar seperti Cimanuk dan Cipandai, kemiskinan tetap menjadi persoalan struktural yang mendesak untuk diselesaikan.

Data objektif menunjukkan bahwa dari total 1.427 kepala keluarga (KK) di Desa Sukasenang, terdapat 410 KK yang masuk dalam kategori fakir miskin. Lebih spesifik lagi, terdapat 237 jiwa yang tergolong sebagai perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE). Angka ini menunjukkan bahwa beban kemiskinan di desa ini memiliki dimensi gender yang kuat. PRSE, yang seringkali merupakan kepala keluarga perempuan atau perempuan dengan beban ekonomi berat tanpa dukungan finansial yang stabil, menjadi kelompok paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani (12,82%) dan buruh harian lepas (10,65%), yang artinya ketergantungan masyarakat terhadap pemilik lahan dan fluktuasi musim sangatlah tinggi. Tingkat pendidikan pun masih didominasi oleh lulusan SLTA (32,67%) dan SD (28,84%), yang secara langsung membatasi daya tawar mereka di pasar kerja formal.

Di tengah kondisi sosio-ekonomi tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi sistem perlindungan sosial yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat seperti PKH, Rastra, atau KIS. Selama ini, intervensi pemerintah seringkali bersifat mekanistik dan top-down, sehingga kurang menyentuh akar kohesi sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, diusulkanlah sebuah Model desa inklusi bebas miskin (DBM). Model ini merupakan sebuah "reinkarnasi" dan restorasi sosial dari konsep nilai kearifan lokal adat Sunda yang pernah berjaya di masa lalu, yaitu prinsip *Rumah Leuit Pare* dan *Lumbung Desa*.

Secara filosofis, *Rumah Leuit* atau lumbung padi bukan sekadar bangunan fisik penyimpan gabah, melainkan simbol ketahanan pangan komunal dan asuransi sosial tradisional. Di dalamnya terkandung nilai bahwa tidak boleh ada satu pun warga desa yang kelaparan selama lumbung desa masih terisi. Nilai ini selaras dengan kearifan lokal *Sabanda Sariksa*. *Sabanda Sariksa* merupakan manifestasi dari tanggung jawab kolektif masyarakat Sunda untuk saling menjaga, membantu, dan menolong kelompok rentan (RTSM/FM/PRSE). Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan komunal.

Relevansi *Sabanda Sariksa* dalam pembentukan Desa Inklusi dapat dijelaskan melalui teori modal sosial Robert D. Putnam (1993, 2000). Putnam menekankan bahwa kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jaringan (*networks*) adalah "pelumas" yang membuat organisasi sosial berjalan efisien. Di Desa Sukasenang, modal sosial ini hadir dalam dua bentuk utama. Pertama, *bonding social capital* (modal sosial pengikat), yang terlihat dalam solidaritas internal perempuan adat Sunda dan kelompok fakir miskin. Mereka memiliki mekanisme bantuan mandiri seperti iuran saat ada warga sakit atau melahirkan, yang menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mematikan empati sosial. Kedua, *bridging social capital* (modal

sosial menjembatani), yang diperlukan untuk menghubungkan kelompok perempuan rentan dengan pihak luar seperti pemerintah, lembaga sosial, dan pasar melalui lembaga seperti Koperasi Perempuan Amirah dan KUBE.

Model DBM yang diusulkan berusaha mengintegrasikan kembali peran *grassroots institutions* atau lembaga akar rumput. Desa Sukasenang sebenarnya memiliki modal kelembagaan yang kuat, mulai dari PKK yang aktif dalam bidang kesehatan, koperasi perempuan amirah yang telah mengelola aset ratusan juta rupiah, hingga berbagai kelompok wanita tani (KWT) dan perkumpulan petani pengguna air (P3A). Namun, lembaga-lembaga ini seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa sebuah desain besar pengentasan kemiskinan yang terpadu. Melalui restorasi fungsi lumbung ekonomi dan lembaga sosial desa, model DBM hadir untuk mengadaptasi nilai tradisional tersebut ke dalam sistem ekonomi dan politik modern yang inklusif.

Desa inklusi bebas miskin bukan sekadar desa tanpa orang miskin secara statistik, melainkan sebuah desa di mana kelompok paling rentan—seperti PRSE dan fakir miskin—memiliki akses, partisipasi, dan kontrol yang sama dalam pembangunan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal *Sabanda Sariksa* sebagai ruh pergerakan, Desa Sukasenang berpotensi menjadi model percontohan nasional dalam pengentasan kemiskinan berbasis modal sosial. Pengabdian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kemajuan desa tidak meninggalkan mereka yang lemah, melainkan membawa seluruh elemen masyarakat menuju kemandirian yang bermartabat melalui semangat silih asih, silih asah, dan silih asuh yang terlembagakan dalam sistem desa inklusi.

Method

Pendekatan utama yang digunakan dalam pengabdian masyarakat di Desa Sukasenang ini adalah pengembangan masyarakat (*community development*). Pendekatan ini dipilih karena menitikberatkan pada proses penguatan kapasitas lokal untuk menciptakan perubahan sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Sejalan dengan pemikiran Charles Zastrow (1981), metode ini memandang masyarakat bukan sebagai objek pasif penerima bantuan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki potensi dan modal sosial untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Strategi yang diterapkan berfokus pada pengorganisasian kembali (*reorganizing*) sistem sosial yang sudah ada untuk diintegrasikan ke dalam model desa inklusi bebas miskin (DBM).

Secara operasional, pelaksanaan pengabdian ini mengikuti tahapan-tahapan yang terstruktur guna memastikan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE). Berikut adalah tahapan metode yang dilaksanakan:

(1). Sosialisasi dan Penyadaran (*Awakening*)- 20 Agustus 2021

Tahap awal dimulai dengan sosialisasi program melalui forum "rembug warga". Di sini, tim pendamping sosial bertindak sebagai fasilitator untuk memperkenalkan konsep desa inklusi bebas miskin (DBM). Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa kemiskinan bukan sekadar nasib, melainkan

tantangan struktural yang bisa diatasi dengan restorasi nilai kearifan lokal *Sabanda Sariksa*. Pada tahap ini, dilakukan dialog terbuka untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusivitas, di mana setiap kebijakan desa harus melibatkan dan berpihak pada kelompok yang paling marginal.

(2). Pembentukan Komite Sosial Desa (KSD)-25 Agustus 2021

Sebagai motor penggerak keberlanjutan program, dibentuklah komite sosial desa (KSD). KSD merupakan institusi akar rumput (*grassroots institution*) yang berfungsi sebagai wadah pertemuan dan jaringan sosial (*community Meeting Forum*). Rekrutmen pengurus KSD dilakukan secara partisipatif, melibatkan keterwakilan perempuan dari kader PKK, posyandu, kelompok wanita tani (KWT), hingga organisasi perempuan kepala keluarga (PEKKA). KSD didesain sebagai lembaga formal tingkat desa yang memiliki legitimasi untuk melakukan advokasi sosial dan mengoordinasikan bantuan perlindungan sosial agar tepat sasaran. Pembentukan lembaga ini krusial untuk memastikan adanya kepemilikan lokal (*local ownership*) terhadap program DBM.

(3). Asesmen Partisipatif dan Pengumpulan Data-30 Agustus 2021

Setelah KSD terbentuk, dilakukan proses asesmen mendalam untuk memetakan masalah dan potensi. KSD membentuk empat tim kerja masyarakat yang terdiri dari: Tim kerja pendidikan dan kesehatan: mengidentifikasi isu anak putus sekolah dan akses layanan medis. Tim kerja ketenagakerjaan dan pendapatan: memetakan profil buruh tani dan peluang ekonomi kreatif. Tim kerja perlindungan sosial: memverifikasi data penerima bansos (PKH, BPNT, KIS). Tim kerja infrastruktur dan perumahan: mendata kondisi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Metode pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan rumah (*home visit*) dan wawancara mendalam kepada keluarga miskin. Data yang terkumpul kemudian dianalisis bersama menggunakan analisis kekuatan, peluang, dan hambatan untuk menentukan skala prioritas intervensi.

(4). Penyusunan Rencana Aksi Desa (RAD)- 5 September 2021

Berdasarkan hasil asesmen, masyarakat melalui musyawarah desa menyusun rencana aksi desa (RAD). Dokumen ini merupakan peta jalan (*roadmap*) yang memuat rencana kerja jangka pendek dan menengah untuk mewujudkan desa bebas miskin. RAD mencakup pengalokasian dana desa, mobilisasi iuran swadaya, serta pembagian peran antar lembaga (PKK, Karang Taruna, dan Koperasi). Dalam tahap ini, prinsip inklusi benar-benar diuji, di mana suara kelompok PRSE dan fakir miskin harus didengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa.

(5). Mobilisasi Sumber Daya dan Implementasi-10 september 2021

Tahap ini merupakan fase eksekusi dari rencana aksi yang telah disepakati. Mobilisasi sumber daya mencakup: sumber daya manusia: melibatkan relawan sosial, tokoh agama, dan kader perempuan sebagai pendamping keluarga miskin. Sumber daya finansial: mengintegrasikan bantuan pemerintah (seperti dana desa) dengan sistem perlindungan sosial tradisional (zakat, infaq, sedekah/ZIS). Pembangunan kolektif: menginisiasi pembentukan usaha kolektif desa atau *collective farming* (lumbung desa modern) untuk menjamin ketahanan pangan bagi warga yang tidak memiliki lahan.

(6). Monitoring dan Evaluasi Inklusif-20 September 2021

Tahap terakhir adalah evaluasi untuk mengukur keberhasilan program berdasarkan indikator ketahanan sosial. Evaluasi tidak hanya melihat angka penurunan kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga melihat peningkatan partisipasi sosial kelompok rentan dalam organisasi desa. Proses monitoring dilakukan secara berkala oleh KSD didampingi oleh akademisi atau pekerja sosial profesional untuk memastikan bahwa setiap hambatan dalam pelaksanaan program dapat segera dicarikan solusinya melalui mekanisme rujukan sosial (*referral system*).

Dengan menggunakan rangkaian metode ini, pengabdian masyarakat di Desa Sukasenang diharapkan mampu menciptakan sistem desa yang resilien, di mana struktur sosial yang ada tidak lagi meminggirkan orang miskin, melainkan merangkul mereka kembali melalui sistem *Sabanda Sariksa* yang modern dan rasional.

Result and Discussion

(1). Analisis Modal Sosial dalam Model Desa Inklusi

Implementasi model desa inklusi bebas miskin (DBM) di Desa Sukasenang menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat berhasil hanya dengan intervensi material, melainkan harus menyentuh penguatan modal sosial. Mengacu pada kerangka pemikiran Robert D. Putnam, hasil pengabdian ini mengidentifikasi tiga mekanisme modal sosial yang menjadi fondasi ketahanan masyarakat:

a. *Bounding Social Capital* (Modal Sosial Pengikat)

Di Desa Sukasenang, *bounding system* muncul sebagai mekanisme kohesi internal yang sangat kuat di kalangan keluarga miskin. Hasil observasi dan pendampingan menunjukkan adanya fenomena unik: meskipun warga berada dalam keterbatasan ekonomi, rasa solidaritas tetap terjaga. Hal ini tercermin dalam praktik berbagi sumber daya primer; misalnya, jika satu keluarga miskin kehabisan beras, tetangga sesama keluarga miskin akan membagi persediaan mereka tanpa pamrih.

Ikatan ini juga terlihat jelas dalam peristiwa-peristiwa sosial seperti kelahiran, kesakitan, atau kematian. Warga secara berbondong-bondong memberikan bantuan tenaga, pikiran, hingga materi seadanya untuk meringankan beban sesama. Dalam perspektif desa inklusi, *bounding* ini merupakan aset krusial. Kelompok rentan tidak merasa terisolasi karena mereka memiliki jaringan pengaman sosial berbasis emosional dan nilai *Silih Asih*. Penguatan *bounding* melalui kelompok-kelompok kecil di tingkat RT/RW menjadi langkah awal untuk membangun rasa percaya diri kolektif warga miskin sebelum mereka berinteraksi dengan sistem yang lebih luas.

b. *Bridging Social Capital* (Modal Sosial Menjembatani)

Mekanisme kedua adalah pertukaran antar-pelaku dengan status sosial yang berbeda. Di Desa Sukasenang, hal ini terlihat dalam hubungan antara warga miskin dengan warga mampu atau pengusaha desa (seperti pengusaha kue legit dan bolu). Menariknya, hubungan ini sering kali berbentuk sistem patron-klien yang positif. Warga miskin mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian (*on-farming*) maupun industri rumahan (*off-farming*), sementara para pengusaha memberikan jaminan perlindungan informal.

Warga mampu di desa ini tidak jarang menebuskan beras rastra bagi tetangganya yang tidak memiliki uang tunai, atau menyalurkan zakat secara rutin. Dalam model DBM, hubungan patron-klien ini direstorasi agar tidak bersifat eksploitatif. Koperasi perempuan amirah menjadi instrumen *bridging* yang efektif, di mana modal yang terkumpul dari anggota (yang mencakup warga mampu dan miskin) diputar kembali untuk memberikan pinjaman lunak bagi usaha mikro perempuan. Ini membuktikan bahwa modal sosial mampu menjadi "pelumas" ekonomi desa yang meminimalkan gesekan antara kelas sosial.

c. *Synergy System* (Modal Sosial Sinergi)

Sinergi merupakan titik temu antara institusi formal (pemerintah) dengan kelompok partikelir/swasta. Di Desa Sukasenang, sinergi tercipta melalui integrasi program perlindungan sosial pemerintah (seperti PKH, KIS, dan dana desa) dengan sistem bantuan tradisional. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang merespons keluhan warga terkait bantuan yang tidak tepat sasaran.

Melalui pembentukan komite sosial desa (KSD), tercipta mekanisme rujukan yang rasional. Warga miskin tidak lagi hanya menjadi penerima pasif bantuan pusat, tetapi aktif melalui kader PKK dan PSM untuk mengadvokasi kebutuhan mereka. Sinergi ini memastikan bahwa sumber daya dari pemerintah pusat digunakan sebagai modal dasar, sementara sumber daya lokal (zakat, infaq, sedekah) digunakan sebagai dana darurat untuk masalah sosial yang tidak tercover oleh APBN.

(2). Pelaksanaan Program Bidang Ekonomi: Pemberdayaan Perempuan melalui KUBE

Salah satu pilar utama DBM adalah pemberdayaan ekonomi yang inklusif bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE). Berdasarkan aspirasi warga, dibentuklah kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai wadah kolektif untuk meningkatkan pendapatan.

Pada Maret 2016, melalui pendampingan mahasiswa dan tokoh masyarakat, dibentuk 8 kelompok usaha yang mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu dari keluarga fakir miskin. Salah satu kegiatan unggulannya adalah pelatihan pembuatan kue (legit dan bolu ketan). Pelatihan ini tidak hanya

mengajarkan aspek teknis produksi, tetapi juga manajemen pemasaran dan motivasi kewirausahaan. Tujuannya adalah transformasi mental dari "penerima bantuan" menjadi "pelaku ekonomi mandiri".

Intervensi ini memanfaatkan potensi industri rumahan yang sudah ada di Desa Sukasenang. Dengan menggandeng instruktur dari pelaku usaha sukses setempat, peserta PRSE mendapatkan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) yang praktis. Dampaknya, beberapa peserta mulai membuka unit usaha kecil di rumah masing-masing, yang secara perlahan mengurangi ketergantungan mereka pada buruh tani musiman yang berpendapatan tidak menentu.

(3) Bidang *Collective Farming*: Restorasi Lumbung Desa Modern

Kearifan lokal *rumah leuit* diwujudkan kembali melalui konsep *collective farming*. Mengingat luasnya lahan persawahan di Desa Sukasenang, tim pengabdian bersama Karang Taruna menginisiasi pengelolaan lahan pertanian secara kolektif untuk kepentingan ketahanan pangan desa.

Target utama dari *collective farming* adalah penyediaan stok beras darurat di setiap kampung. Mekanismenya adalah dengan mengalokasikan satu hingga dua petak tanah desa (tanah kas desa atau hibah) yang digarap secara gotong royong. Hasil panen dari lahan ini tidak dijual secara komersial, melainkan disimpan di lumbung desa sebagai cadangan pangan bagi warga yang sedang mengalami paceklik atau tidak mampu menebus beras sejahtera.

Program ini diujicobakan di kampung purbasana sebagai percontohan (*pilot project*). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada iuran donatur lokal (warga mampu) dan kesediaan masyarakat untuk menyumbangkan tenaga dalam menggarap lahan. Melalui lumbung desa modern ini, Desa Sukasenang menghidupkan kembali filosofi *Sabanda Sariksa*: bahwa ketersediaan pangan di desa adalah tanggung jawab bersama, sehingga tidak boleh ada warga yang kelaparan di tengah hamparan sawah yang subur.

(4.) Bidang Pendidikan: Penanganan Anak Putus Sekolah

Asesmen yang dilakukan KSD menemukan bahwa kemiskinan di Desa Sukasenang berbanding lurus dengan rendahnya motivasi pendidikan. Banyak anak putus sekolah di tingkat SD atau SLTP bukan hanya karena faktor biaya, tetapi juga karena kurangnya kesadaran orang tua dan trauma psikologis akibat pola asuh yang keras.

Sebagai respons, program DBM melaksanakan penyuluhan intensif mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Kegiatan ini menyasar para kader PKK dan orang tua dari anak

putus sekolah. Melalui pendekatan bimbingan sosial kolektif, tim memberikan pemahaman bahwa pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Selain penyuluhan, dilakukan juga restorasi perpustakaan desa untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Langkah advokasi juga dilakukan dengan menghubungkan anak-anak putus sekolah tersebut ke program PNPM generasi sehat dan cerdas (GSC) serta koordinasi dengan pihak sekolah terdekat agar mereka dapat kembali mengenyam pendidikan formal atau melalui jalur paket. Penanganan bidang pendidikan ini menegaskan bahwa desa inklusi adalah desa yang menjamin hak tumbuh kembang setiap anak tanpa memandang status ekonomi orang tuanya.

(5). Sintesis dan Keberlanjutan Model DBM

Pembahasan atas hasil kegiatan menunjukkan bahwa model desa inklusi bebas miskin (DBM) berhasil mengubah lanskap penanganan kemiskinan di Desa Sukasenang. Indikator keberhasilannya terlihat dari: Terciptanya kondisi berketahanan sosial: masyarakat mampu mengorganisir diri untuk melindungi warga rentan (RTSM dan PRSE) melalui mekanisme iuran dan bantuan kolektif. Peningkatan partisipasi: kelompok perempuan dan pemuda (karang taruna) menjadi garda terdepan dalam pengelolaan program, bukan lagi sekadar penonton. Optimalisasi kearifan lokal: nilai-nilai Sunda yang hampir punah dikontekstualisasikan dalam bentuk kelembagaan modern (KSD dan KUBE).

Tantangan utama yang ditemukan adalah konsistensi pendanaan dan komitmen politik dari perangkat desa. Namun, dengan adanya aset koperasi perempuan amirah yang mencapai ratusan juta rupiah dan dukungan dana desa yang mulai diarahkan pada pemberdayaan sosial, model DBM memiliki peluang besar untuk menjadi sistem yang menetap (*established*).

Secara teoretis, model ini membuktikan argumen Putnam bahwa modal sosial yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan efisiensi ekonomi dan stabilitas sosial. Di Sukasenang, modal sosial bukan sekadar keakraban antarwarga, melainkan kekuatan terorganisir yang mampu menggantikan peran negara di saat terjadi keterbatasan jangkauan birokrasi dalam menangani masalah kemiskinan di tingkat akar rumput. Desa Inklusi akhirnya menjadi sebuah gerakan restorasi kemanusiaan yang berbasis pada martabat dan solidaritas lokal.

Conclusion

(1). Kesimpulan

Implementasi model desa inklusi bebas miskin (DBM) di Desa Sukasenang membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari akar budaya dan struktur sosial lokal. Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut:

Pertama, model DBM telah berhasil menjadi sarana restorasi sosial dengan menghidupkan kembali kearifan lokal sunda, yaitu filosofi *Sabanda Sariksa* dan konsep *Rumah Leuit*. Nilai-nilai ini terbukti masih sangat relevan untuk diadaptasi ke dalam sistem perlindungan sosial modern guna memperkuat daya tahan masyarakat terhadap kemiskinan.

Kedua, program ini secara nyata telah mengaktivasi kembali peran lembaga akar rumput (*grassroots institutions*). PKK, koperasi perempuan amirah, karang taruna, dan komite sosial desa (KSD) kini tidak lagi bergerak secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu ekosistem perlindungan sosial yang inklusif. Aktivasi lembaga-lembaga ini memungkinkan terciptanya jaring pengaman sosial yang lebih responsif dan tepat sasaran bagi kelompok rentan, khususnya rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE).

Ketiga, penggunaan kerangka modal sosial Robert Putnam (melalui mekanisme *bonding*, *bridging*, dan *synergy*) efektif dalam mengubah paradigma pembangunan desa. Masyarakat Desa Sukasenang telah bergeser dari pola hubungan yang ketergantungan menjadi pola hubungan yang kolaboratif. Dengan adanya *collective farming* dan KUBE, kemandirian ekonomi mulai tumbuh melalui optimalisasi aset kolektif desa.

(2). Rekomendasi

Guna menjamin keberlanjutan model desa inklusi bebas miskin (DBM) dan memperluas dampak positifnya, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Bagi pemerintah desa Sukasenang: Diharapkan untuk memperkuat legalitas komite sosial desa (KSD) melalui peraturan desa (Perdes). Hal ini penting agar alokasi dana desa secara konsisten dapat diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan sosial dan pemeliharaan lumbung pangan desa secara berkelanjutan. Bagi pengurus *grassroots institutions*: koperasi perempuan amirah dan KUBE perlu terus meningkatkan kapasitas manajemen usaha dan memperluas jaringan pasar di luar wilayah Kabupaten Garut. Diversifikasi produk kue dan hasil pertanian kolektif harus terus dikembangkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Bagi Pemerintah Kabupaten Garut: Model DBM di Desa Sukasenang layak dipertimbangkan sebagai *pilot project* untuk direplikasi di desa-desa lain di wilayah Jawa Barat yang memiliki karakteristik budaya serupa. Sinkronisasi antara bantuan pemerintah pusat (PKH/BPNT) dengan inisiatif lokal harus terus dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*). Bagi akademisi dan praktisi pekerjaan sosial: dibutuhkan penelitian lanjutan terkait efektivitas Model DBM dalam jangka panjang, terutama mengenai dampaknya terhadap penurunan angka *stunting* dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di tingkat desa pasca-intervensi.

References

- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Zastrow, C. (1981). *The Practice of Social Work*. Dorsey Press.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Penanggulangan Kemiskinan dan Kebijakan Sosial*. Refika Aditama.

Payne, M. (2005). *Modern Social Work Theory*. Palgrave Macmillan.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.

Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kementerian Sosial RI. (2015). *Pedoman Umum Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*.

Sajogyo. (1982). *Modernisasi Pedesaan*. Yayasan Obor Indonesia.